



PENETAPAN

Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) yang diajukan oleh:

1. **Halim Kusuma bin Miswan**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Dusun Bhakti RT 004 RW 003, Kepenghuluan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Dahlia Damayanti binti Kasman**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bhakti RT 004 RW 003, Kepenghuluan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam suratnya tertanggal 3 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj. tanggal 7 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, karena Pemohon I pada waktu itu masih berstatus suami dari seorang perempuan bernama Nuning Teti Wawan Sari binti Ade Wawan dan dalam proses pengurusan perceraian pada Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung, namun Akta Cerai tersebut belum keluar;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasman bin Ibrahim, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sapi'i Sirait bin Sirun Sirait dan Sujito bin Nakum;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah suami dari seorang perempuan bernama Nuning Teti Wawan Sari binti Ade Wawan, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Bagan Bakti, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama dua hari, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik Pemohon I di Kepenghuluan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Ahmad Maulana Azhar Kusuma bin Halim Kusuma, lahir pada tanggal 3 Februari 2013;
 - b. Ahmad Thoriq Alafif Kusuma bin Halim Kusuma, lahir pada tanggal 5 Februari 2015;
 - c. Ahmad Hamdi Kusuma bin Halim Kusuma, lahir pada tanggal 29 September 2016;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Halim Kusuma bin Miswan) dengan Pemohon II (Dahlia Damayanti binti Kasman) yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 13 April 2012;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan persidangan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan menempelkan permohonan tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari terhitung sejak satu hari setelah tanggal 14 Agustus 2018, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan atau merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara *relaas-relaas* panggilan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj. tanggal 29 Agustus 2018, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo*, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perbaikan dan perubahan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0280/AC/2012/PA.Utj. yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yang masing-masing bernama:

1. **Sujito bin Nakum**, sebagai abang ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II bernama Dahlia Damayanti;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 April tahun 2012 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi sendiri dan H. Nakum;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus suami dari perempuan lain, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan menurut syariat Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon I di Kepenghuluan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena pada saat menikah Pemohon I masih berstatus suami dari perempuan lain, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Kasman bin Ismail**, sebagai ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Halim Kusuma;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 April tahun 2012 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sujito dan H. Nakum;
- Bahwa pada saat menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus suami dari perempuan lain, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan menurut syari'at Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon I di Kepenghuluan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena pada saat menikah Pemohon I masih berstatus suami dari perempuan lain, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama selama 14 hari terhitung sejak satu hari setelah tanggal 14 Agustus 2018, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa berkepentingan dan atau merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 149 sampai dengan halaman 150 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 13 April 2012 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasman, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Sapi'i Sirait bin Sirun Sirait dan Sujito bin Nakum, namun semenjak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan isbat nikah (pengesahan perkawinan) ini diperlukan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan atau pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana telah dimuat pada bagian tentang duduk perkara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah seorang duda cerai hidup, yang telah resmi bercerai dengan talak satu raj'i di Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 25 Oktober tahun 2012, sehingga Pemohon I adalah pihak yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan terdiri dari abang ipar Pemohon I yang Sujito bin Nakum, dan ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasman bin Ismail, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang cakap bertindak dan tidak ada halangan untuk diangkat menjadi saksi, sesuai dengan Pasal 172 R.Bg., telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara langsung mengetahui, melihat dan menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 13 April 2012 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasman, dengan ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Sujito bin Nakum (*i.c.* Saksi I) dan H. Nakum, pada saat menikah Pemohon I berstatus suami dari perempuan lain, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan kedua Saksi *a quo* mengetahui bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu rumah tinggal di rumah milik Pemohon I di Kepenghuluan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama itu pula tidak ada seorang ataupun sekelompok orang yang menggugat dan atau merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Saksi-Saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), akan tetapi selama masa perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena pada saat menikah Pemohon I masih berstatus suami dari perempuan lain, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan permohonan pengesahan perkawinan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat dan mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 April 2012 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasman bin Ismail, dengan ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Sujito bin Nakum dan H. Nakum;
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus suami dari perempuan lain, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tinggal di rumah milik Pemohon I di Kepenghuluhan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
6. Bahwa sejak menikah hingga dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah tinggal, tidak ada pihak-pihak baik perseorangan dan atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti tentang pernikahannya, karena pada saat menikah Pemohon I masih berstatus suami dari perempuan lain, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
8. Bahwa penetapan Pengesahan Perkawinan ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti nikah dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pendapat ahli fikih yang terdapat dalam beberapa kitab yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai berikut:

1. I'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة و شرطه من نحو ولي وشاهد بين عدول

Artinya: Dan pada pengakuan tentang perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil;

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu.

3. Fathu al Mu'in, Juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak termasuk dalam pernikahan yang diancam dengan pembatalan, dan atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan 71 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Halim Kusuma bin Miswan) dengan Pemohon II (Dahlia Damayanti binti Kasman)

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2012 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Halim Kusuma bin Miswan) dengan Pemohon II (Dahlia Damayanti binti Kasman) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2012 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1440 Hijriyah oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Tirmizi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp520.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp611.000,00
(enam ratus sebelas ribu rupiah)	